

PROFIL *CIVIC EDUCATION* DI HONG KONG

M A K A L A H

Tugas Mata Kuliah:

PERBANDINGAN *CIVIC EDUCATION* DI NEGARA BERKEMBANG

Dosen Pengampu: Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A.

Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.



Oleh :

Samsuri

NIM. 0601498

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2007**

PROFIL *CIVIC EDUCATION* DI HONG KONG

Oleh :
Samsuri
NIM. 0601498

A. Pendahuluan

Kajian terhadap perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Hong Kong menjadi amat menarik. Pertama, sebagai bekas “negara kota” jajahan Inggris, Hong Kong mengalami satu pergeseran identitas politik dari wilayah koloni menjadi kesatuan wilayah berdaulat di bawah pemerintah China Daratan (Republik Rakyat China, RRC). Hal ini membawa akibat pada status Hong Kong sebagai daerah pemerintah khusus di dalam negara RRC yang dikenal sebagai “One Country, Two Systems.” Kedua, perubahan identitas politik tadi mempengaruhi sistem politik yang pada masa kolonial Inggris, Hong Kong begitu kuat ditanamkan arti penting prinsip-prinsip pemerintahan demokrasi liberal model Inggris. Namun, setelah penyerahan kedaulatan Hong Kong kepada RRC, maka berdampak pada proses politik yang mengikuti budaya politik China yang dominan dipengaruhi Konfusianisme.

Lalu, bagaimana pengaruh perubahan politik Hong Kong pasca 1997 terhadap pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) di sekolah-sekolah Hong Kong? Dari pertanyaan ini, makalah ini berusaha mengeksplorasi perkembangan *civic education* di Hong Kong baik pada masa kolonial Inggris maupun setelah penyerahan kedaulatan pada 1 Juli 1997 hingga sekarang.

Berikutnya, pada makalah ini akan berturut-turut dibahas landasan pengembangan *civic education* di Hong Kong; kerangka sistematika *civic education*; kurikulum dan bahan belajar *civic education*; serta kultur kelas dan situs kewarganegaraan dari *civic education* di Hong Kong.

Dari paparan makalah ini diharapkan ada semacam pemahaman bahwa pendidikan kewarganegaraan sangat erat dengan konteks nilai kehidupan politik negara bersangkutan. Selain itu, dari pengalaman *civic education* di Hong Kong dapat diperoleh refleksi dan perbaikan terhadap praktik *civic education* di Indonesia.

B. Konteks *Civic Education* di Hong Kong

Pada 1 Juli 1997 Hong Kong diserahkan kembali kepada RRC setelah sekitar satu setengah abad menjadi salah satu koloni Inggris. Dalam waktu yang lama, sejarah kolonial di Hong Kong ditandai oleh sebuah strategi depolitisasi dari pemerintah Inggris, dan warga negara menjadi apolitis (Lee, 1999: 314). Menurut Lee Wing On (1999: 314), ada dua alasan utama menjadikan karakteristik depolitisasi Hong Kong tersebut. Pertama, secara geografis Hong Kong lebih dekat dibanding Inggris, dan China memiliki pengaruh kuat terutama dalam arti suplai pangan dan air serta kontrol terhadap arus pengungsi dan imigran. Kondisi ini mengakibatkan berpengaruh secara politik terhadap Hong Kong. Kedua, Hong Kong sendiri adalah sebuah wilayah imigran yang secara luas terdiri atas para pengungsi China. Ini mengakibatkan rakyat awam Hong Kong menjaga jarak dengan pemerintah dan badan peradilan bahkan menghindari sejauh mungkin kecendrungan politik akibat pengungsian itu. Pada gilirannya warga Hong Kong lebih memfokuskan diri kepada kegiatan-kegiatan ekonomi.

Pada 1984 ditandatangani sebuah *Sino-British Joint Declaration* sebagai satu proses dekolonisasi yang antara lain mengembalikan Hong Kong kepada RRC pada Juli 1997. Waktu 13 tahun untuk proses dekolonisasi ini memberikan kesempatan “politisasi” bagi warga Hong Kong untuk membentuk “pemerintahan sendiri” melalui pembentukan Dewan Legislatif pada 1991. Perubahan lainnya –sesuai topik makalah ini –ialah dalam kurikulum sekolah.

Civic education yang diajarkan di sekolah-sekolah sejak pertama ditawarkan pada 1950. Pada 1952, kajian *civics* bersama-sama geografi dan sejarah membentuk mata pelajaran baru yang disebut *social studies* di dalam kurikulum sekolah dasar (Lee, 1999:315). *Civics* diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri di sekolah menengah pertama hingga kemudian diganti oleh mata pelajaran *economic and public affairs* (EPA) pada 1965. Selanjutnya pada 1980an silabus EPA direvisi dengan tekanan pada “individual and society” dan “enhancement of political awareness” (Lee, 1999: 315). Pada 1972 di dalam *social studies* dikenalkan kajian *government* di tingkat sekolah menengah pertama, yang membahas topik hubungan antara individu dan masyarakat sama halnya dengan peran warga Negara di tingkat masyarakat local dan internasional. *Social studies* kemudian diperluas untuk tingkat sekolah menengah atas pada tahun 1984 (Lee, 1999:315-316).

Pada 1980an, mata pelajaran baru *Government and Public Affairs* (GPA) dikenalkan di sekolah menengah atas. Secara umum materi dalam Silabus GPA adalah sama untuk bagian *public affairs* dalam silabus EPA, namun GPA lebih besar menekankan kepada konsep-konsep pokok demokrasi liberal (*the rule of law*, perwakilan, *consultation*, pemilihan umum), dan studi proses politik di China. Pada 1991 dikenalkan mata pelajaran baru, *Liberal Studies*, pada tingkat matrikulasi. Mata pelajaran ini memuat enam modul di mana siswa harus memilih dua modul untuk ujiannya. Khusus untuk modul “China Today”

disajikan dalam masalah Hong Kong pada saat transisi kolonialnya (Lee, 1999:316).

Pada Agustus 1985 *Curriculum Development Committee (CDC)* Departemen Pendidikan Hong Kong meluncurkan *Guidelines on Civic Education in Schools*. *Guidelines* ini merupakan bagian dari tanggapan terhadap pendapat Pemerintah Hong Kong dalam *White Paper on the Further Development of Representative Government in Hong Kong* pada 1984, yang menganjurkan adanya “need for the public to be educated more effectively for developing the local system of government and noted the role which the Education Department would pursue in promoting civic education through the school curriculum” (CDC, 1985 dalam Lee, 1999: 318).

Pada 1993, badan *The Education and Manpower Branch of the Government Secretariat* telah menerbitkan *School Education in Hong Kong: A Statement Aims*. Pada tujuan ketujuh dinyatakan: “The school is an important agency nurturing civic responsibility and for preparing young people to adjust to rapid change in a way which promotes social stability.” Kemudian, pada tujuan ke-12 dinyatakan bahwa, “School should help students to become aware of Hong Kong as a society; to develop a sense of civic duty, responsibility to the family and service to the community; and to exercise tolerance in interacting with others” (Lee, 1999: 316).

Pada 1996 dikembangkan lagi dokumen *Guidelines on Civic Education in School 1996*. Dokumen ini menyebutkan bahwa salah tujuan *civic education* di Hong Kong ialah :

- a. *To enable students to understand how the individual, as a citizen, relates to the family, the neighbouring community, the regional community, the national community and the world; and to develop in them positive attitudes and values conducive to the development of a sense of belonging to Hong Kong and China so*

that they are ready to contribute to the betterment of the society, the state and the world (Guidelines on Civic Education 1996 dalam Lam, 2004: 44).

Selain *Guidelines on Civic Education in School 1996* ada dokumen lainnya yang dipergunakan dalam penyajian *civic education* di sekolah dasar dan menengah di Hong Kong. Dokumen tersebut ialah *Civic Education (Secondary 1-3) 1998* dan *Basic education Curriculum Guide – Building on Strengths (Primary 1 – Secondary 3)* (Lam, 2004: 43).

C. Landasan Pengembangan *Civic Education* di Hong Kong

Sebagaimana telah dipaparkan di muka bahwa, *civic education* di Hong Kong telah mengalami perkembangan seiring konteks politik yang berkembang. Perkembangan *civic education* di Hong Kong, dalam penelitian Lam Ting Kwai (2004: 10-15), terdapat beberapa aspek dominan. Aspek dominan ini mewarnai *civic education* itu sendiri. Dalam *Civic Education Guidelines in School 1996*, *civic education* lebih mirip sebagai pendidikan moral. Materi kajiannya meliputi pendidikan nilai-nilai, pendidikan kewarganegaraan, dan pelatihan ketrampilan kritis. Nuansa pendidikan moral dalam *civic education* diperkukuh dengan menjadikannya sebagai mata pelajaran tersendiri dalam *Basic education Curriculum Guide – Building on Strengths (Primary 1 – Secondary 3)* yang diedarkan pada 2002 oleh Curriculum Development Council (Lam, 2004: 14).

Pada bagian lain, kedua dokumen pengembangan *civic education* di Hong Kong pasca 1997 tersebut bercorak pendidikan patriotik. Sebagaimana telah diketahui bahwa pada masa colonial, pendidikan nasionalistik dalam *civic education* di Hong Kong tidak ada. Pelajaran “Civics” digantikan oleh “Economic and Public Affairs” (EPA) ataupun “Government and Public Affairs” (GPA). Dengan demikian, pelajaran *civic education* menjadi “anational” (Tsang, 1998

dalam Lam, 2004: 16). Dalam laporan *The Preliminary Working Committee for the Special Administration Region for the Special Administrative Region* cukup tegas dinyatakan bahwa :

Civic Education in Hong Kong has been underemphasized, and is weak in nationalism and patriotism...following the resumption of Chinese sovereignty, civic education in Hong Kong should aim at building nationalism and patriotism, and at strengthening the teaching of the Basic Law and the concept of "one country, two systems".(sebagaimana dikutip Lam, 2004: 41).

Dari pernyataan tersebut maka tepat apa yang dikatakan oleh Lee Wing On bahwa Hong Kong :

....shows that while there is apparent declaration of nationalisation in the citizenship curriculum, the citizenship skills advocated in the citizenship curriculum can be quite globalised. In sum, ideological tension in Hong Kong's citizenship curriculum is in one way or another related to Hong Kong people's national identity, resulting from its political transition (Lee Wing On, 2006: 10).

Pada bagian lain, pengenalan "Civics Education" ke dalam kurikulum sekolah telah membantu siswa guna meneguhkan pemahaman kebangsaan dan rasa memilikinya, yang akan mengarah kepada pembentukan sebuah identitas nasional (Tammy Kwan, 2003: 65).

D. Kurikulum dan Bahan Ajar *Civic Education* di Hong Kong

Secara umum kurikulum pendidikan di Hong Kong pasca 1997 antara lain meliputi pelajaran-pelajaran sebagai berikut:

- *Chinese Language Education;*
- *English Language Education;*
- *Mathematics Education;*
- *Science Education;*
- *Technology Education;*

- *Personal, Social and Humanities Education (PSHE)*;
- *Arts Education*;
- *Physical Education* (Tammy Kwan, 2003: 67).

Kaitannya dengan *civic education* di lingkungan sekolah di Hong Kong pasca 1997, pemerintah setempat makin meningkatkan unsur-unsur ke-China-an dalam kurikulum sekolah, Sebagai contoh, sejarah dan budaya China dirancang sebagai unsur pokok (core elements) pembelajaran dengan nama baru: *Personal, Social and Humanities Education (PSHE)*. Lebih dari itu, kegiatan-kegiatan ekstra-kurikuler dikaitkan dengan budaya China seperti orkestra China, tarian China, dan kelas-kelas Kung Fu, menjadi intensif (Lee, 2006: 4). Sebagai gambaran kompetensi dasar PSHE di tiap jenjang sekolah (dasar hingga menengah atas) dijabarkan dalam Tabel 1. Dari tabel tersebut tampak jelas bahwa konsep nasionalisme dan moralitas (konfusianisme) dalam PSHE menjadi dasar bagi *civic education* di Hong Kong. Selain itu, PSHE ini memuat aspek-aspek kajian secara integratif bagi mata pelajaran lainnya yang menjadi etos pembelajaran sepanjang hayat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 1. The strand of Social System and Citizenship with the breakdown of objectives in the three domain areas across the four key stages of education (i.e. lower and upper primary, junior and senior secondary) within Personal, Social and Humanities Education

<i>Strand VI (stage 1)</i>	<i>Strand VI (stage 2)</i>	<i>Strand VI (stage 3)</i>	<i>Strand VI (stage 4)</i>
<i>Knowledge and understanding:</i> 1. to identify the multiple roles of an individual in different social groups and to understand the respective rights and responsibilities one may have within the groups	<i>Knowledge and understanding:</i> 1. to identify the norms within the groups where an individual is engaged, and to understand the important effects these norms exert in our daily lives 2. to understand	<i>Knowledge and understanding:</i> 1. to understand the importance of the Basic Law and the basic principles and meanings of 'One Country, Two Systems', 'Hong Kong People Ruling Hong Kong', and 'A High Degree of Autonomy'	<i>Knowledge and understanding:</i> 1. to examine the interaction between local social and political systems 2. to identify the key features of social and political systems in the national and global contexts 3. to analyse diversified

2. to understand the differences among people and the need to respect the rights of other people 3. to understand the importance of social virtues, the functions of rules and regulations, and the importance of the Basic Law to the HKSAR residents 4. to identify the local and national symbols 5. to identify some community services provided by the Government <i>Skills:</i> 1. to exercise one's own rights, accept and fulfill one's responsibilities 2. to make good use of community services <i>Values and attitudes:</i> 1. to show respect for the rights of others 2. to develop virtues, e.g. honesty, integrity and a sense of local and national identities 3. to appreciate the need for fair rules and be willing to observe rules and regulations	the rights and responsibilities of an individual and how they are protected by the Basic Law and the local legal system 3. to understand the functions of and services provided by the Government and local social institutions in response to needs and interests of HK residents <i>Skills:</i> 1. to reflect on the balance between conformity to social norms and personal identity 2. to reflect on the balance between rights and responsibilities, and to exercise one's rights and responsibilities in various settings through different channels <i>Values and attitudes:</i> 1. to be willing to contribute to the collective interests of the community	2. to understand the relationship of National Constitution with the HKSAR residents 3. to understand the key features of local social and political institution 4. to analyse the causes and effects of social and political issues at local, national and global levels <i>Skills:</i> 1. to research public issues/ civic affairs 2. to exercise skills of monitoring to exert influence in local affairs <i>Values and attitudes:</i> 1. to show respect for and uphold the rule of law conducive to maintenance of order and stability in society 2. to keep informed about current affairs, and be willing to contribute to resolve problems/issues at local, national and global levels	views on rights and responsibilities in different cultural contexts 4. to evaluate different views on social virtues 5. to analyse and evaluate relationships among local, national and global identities <i>Skills:</i> 1. to distinguish between facts and opinion, between means and ends with a view to promoting a consensual view amongst diversified views, or arriving at a wise choice of alternative views based on rational judgement and sound arguments supported by ample evidence <i>Values and attitudes:</i> 1. to cultivate an open mind to accept and respect different views and be willing to resolve disagreements 2. to develop a global perspective and be willing to contribute to improve the quality of life in the local, national and international communities through active involvement in civic affairs
---	--	--	--

Source: Curriculum Development Council (2000) *Learning to Learn: Personal, Social and Humanities Education (Consultation Document)*, pages 34–37 sebagaimana dikutip dalam (Tammy Kwan, 2003: 71).

Tabel 2. Pengembangan konseptual PSHE termasuk enam bagian topic dan sub topic dalam pembelajaran sepanjang hayat.

<i>Strands</i>	<i>Sub-strands</i>	<i>Perspective</i>
I Personal and Social Development	• Self-esteem • Self-management • Healthy lifestyles • Human relationships • Sexuality issues	To understand people as individuals (This strand integrates content and learning outcomes across the subject areas of Personal and Social Education, Civic Education and Religious and Ethical Education)
II Time, Continuity and Change	• Time and chronology • Understanding the past • Change and continuity • Interpretations and perspectives	To understand people in relation to time (This strand integrates content and learning outcomes across the subject areas of Chinese History and History)
III Culture and Heritage	• Foundation of culture • Customs and traditions • Modernization and the post modern world • Cultural diversities and interaction	To understand people in the cultural world (This strand integrates content and learning outcomes across the subject areas of Chinese History, History, Ethics and Religious Studies and Travel and Tourism)
IV Place and Environment	• Natural and human features of a place • Spatial association and interaction • People – environment interrelationships • Conservation and sustainable development	To understand people in relation to space and the environment (This strand integrates content and learning outcomes across the subject areas of Geography, Environmental Education and Travel and Tourism)
V Resources and Economic Activities	• Use of resources • Production and consumption • People and work • Exchange	To understand people in the material world (This strand integrates content and learning outcomes across the subject areas of Economics, Geography, Government and Public Affairs and Travel and Tourism)
VI Social Systems and Citizenship	• Rights, responsibilities and social virtues • Social norms, rules and law • Local, national and global identities • Social system, political system and interaction	To understand people as groups (This strand integrates content and learning outcomes across the subject areas of Civic Education, Government and Public Affairs and Ethics and Religious Studies)

Source: Curriculum Development Council (2000) *Learning to Learn: Personal, Social and Humanities Education (Consultation Document)*, page 15 (sebagaimana dikutip Tammy Kwan, 2003: 70).

Hal demikian tentu saja amat berbeda dengan konten *civic education* di Hong Kong pada masa sebelum penyerahan kedaulatan kepada RRC. Sebagai bahan perbandingan dapat disimak konten materi *civic education* dalam buku-buku teks mata pelajaran EPA seperti tampak pada Tabel 3. Pada pelajaran EPA, konten *civic education* lebih banyak memuat aspek pengetahuan system politik

liberal dan ekonomi kapitalis. Kendatipun ada topic mengenai Hong Kong, tetapi tidak menyentuh persoalan identitas nasional Hong Kong sebagai bagian nasionalisme China.

Tabel 3. Konten Kajian *Civic Education* pada Pelajaran *EPA*

No	Topik "Civic Education" dalam Buku Teks <i>EPA</i>
1	Hong Kong political system 1. Hong Kong as an entity: colony, history, areas, climate/ relief, economy and population, growth, people, etc. 2. Constitution, i.e. Basic Law, the Sino-British Joint Declaration, Hong Kong in transition 3. Political development and future of Hong Kong, history, institutions, structure, composition, functions of central and local governments, the judiciary, District Board and elections, etc. 4. Social institutions and political ideologies, political parties, political theories, principles and concepts such as rule of law, democracy, freedom of the press, mass media, advertising and consumer education, definition and importance of government, cosmopolitanism, etc.
2	Political output 1. Administrative objectives and policy-making process Law and order, legal system, e.g. the judiciary, police force, ICAC, Correctional Service Department, law and order, etc. 2. Government's role in economy, intervention, taxation, defence and foreign policy, foreign affairs, trade promotion, etc 3. Social services provided by the government, e.g. census, education, vocational training, social welfare, housing, labour, medical and health services, measures against social evils, etc. 4. Services provided by Consumer Council, voluntary agencies, etc.
3	Political input 1. Government and people: channels of communication, advisory institutions, etc. 2. Election and participation in community affairs: election process, meaning of election, etc.
4	Self as political actor 1. Status: identity of citizen, my role as a citizen 2. Rights of citizen 3. Political, social and personal obligations of citizen
5	Others 1. Hong Kong and the outer world: transportation, communication, economic linkage, place in the world, as an international trade and finance centre, international relations and organisations, tourism 2. Public utilities, food, water and power supply, etc. 3. Social and economic issues and problems, their prevention and remedies: pollution and 4. conservation, smoking, alcoholism, diseases, juvenile delinquency, drug abuse, education, social welfare, housing, public health, industrial problems, AIDS, transportation and communication, etc. 5. Production, division of labour, visible and invisible trade, types of industry, financial services, sales methods, etc. 6. Living skills/knowledge: leisure, hobbies, safety measures, road safety, advertising and consumer protection, etc. 7. Methodology of social science, critical thinking, judgement, problem-solving, decision-making, choice

Source: Thomas Kwan-Choi Tse (2000: 100-101).

E. Kultur Kelas *Civic Education* dan Situs Kewarganegaraan di Hong Kong

Depolitisasi dalam pembelajaran *civic education* di Hong Kong pada masa kolonial Inggris tampak masih terasa kuat selama transisi pasca penyerahan kedaulatan tahun 1997. Pada periode kolonial, pembelajaran *civic education* menghindari perbincangan topik politik, sehingga *civic education* steril dari kajian hal demikian. Siswa lebih bersifat pasif, dituntut taat dan patuh. Selama periode kolonial Inggris, *civic education* di Hong Kong tak pernah mendapat tempat penting di kurikulum sekolah Hong Kong. Meskipun pada 1950 pemerintah colonial secara formal telah mengenalkan “Civics” ke dalam kurikulum sekolah menengah sebagai sebuah mata pelajaran untuk ujian terbuka. Kemudian pada 1965 ia diubah menjadi “Economic and Public Affairs” (EPA), yang lebih menekankan aspek lokal dan ekonomi. Namun, silabus mata pelajaran baru itu lebih menekankan bahwa dalam koloni Hong Kong kewajiban warga negara ialah untuk mematuhi hukum dan taat kepada pemerintah. Politik masih menjadi bahan yang sangat sensitive (peka) ketika itu. Guru diminta tidak membawa nilai-nilai politik dalam diskusi-diskusi dengan para siswa. *Section 98 of Education Regulation 1971* melarang para siswa untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan politik, dan mencegah sekolah-sekolah dari penyelenggaraan program politik (Shui, 1997: 89).

Ada beberapa alasan mengapa *civic education* tidak efektif di Hong Kong. Satu alasan menyebutkan bahwa politik masih menjadi sesuatu yang sensitif di sekolah-sekolah Hong Kong. Ini nampak pada *Guidelines on Civic Education* yang bersifat ambigu dalam sikapnya terhadap pendidikan politik (Shui, 1997: 91).

Dari penelitian Lee Wing On (1999: 335) terhadap situasi kelas pembelajaran *civic education* di Hong Kong pasca penyerahan kedaulatan (1997) ditemukan bahwa kepala sekolah dan guru-guru memandang perlu untuk

diskusi-diskusi terbuka dan pengembangan pemikiran kritis dan analitis di antara para siswa. Pada saat yang sama mereka juga mengeluhkan siswa-siswanya yang tidak aktif di kelas, dan tidak tertarik dengan topik-topik *civic education*. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa ujian-ujian di kelas mereka difokuskan kepada mereproduksi materi-materi buku-buku teks, dengan sedikit atau kurang menekankan kepada diskusi-diskusi isu-isu kontroversial. Lainnya, tekanan datang dari publik terhadap sekolah-sekolah untuk mengajar ekonomi, sejarah, dan geografi daripada *social studies*. Ini dapat dipahami karena baik guru maupun siswa tidak memberi perhatian banyak kepada *civic education*.

F. Penutup

Nasib *civic education* di Hong Kong baik sebelum maupun sesudah penyerahan kedaulatan pada 1997 pada taraf tertentu hampir memiliki persamaan-persamaan dengan kondisi yang ada di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru (lihat disertasi Freddy Kiran Kalidjernih, 2005). Jika di masa Orde Baru, *civic education* identik dengan pendidikan moral yang dijabarkan dari tafsir rejim atas Pancasila sebagai ideologi negara, maka di Hong Kong lebih banyak menanamkan *status quo* pemerintah kolonial pada sebelum 1997 dan menekankan identitas nasional serta warisan kultural Hong Kong kepada China pasca 1997.

Persamaan lainnya, pada era Orde Baru di Indonesia *civic education* menjadi tidak menarik karena selain materi pembelajarannya yang indoktrinatif juga metodenya kurang merangsang nalar kritis siswa, sehingga pembelajaran yang dilakukan lebih banyak pada mereproduksi materi dalam bentuk hapalan-hapalan, kurang bersentuhan dengan pengalaman hidup siswa dan guru. Di pihak lain, *civic education* di Hong Kong mengalami kondisi yang hampir tak

berbeda, yang justru diperparah oleh tuntutan kapitalisme dunia pendidikan sehingga kajian *civic education* tidak banyak diminati siswa dan guru.

* * * * *

DAFTAR PUSTAKA

- Freddy Kiran Kalidjernih, 2005, *Post-Colonial Citizenship Education: A Critical Study of the Production and Reproduction of the Indonesian Civic Ideal*, Disertasi Ph.D, University of Tasmania, Australia
- Lee Wing On, 1999, "Controversies of Civic Education in Political Transition," dalam Torney-Purta, J., Schwille, J. dan Amadeo, J., *Civic Education Across Countries: Twenty-four National Case Studies from the IEA Civic Education Project*. Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement, pp. 313-340.
- Lee Wing On, 2006, "Tensions and Contentions in the Development of Citizenship Curriculum in Asian Countries," *Keynote Address presented at the CITIZED International Conference Oriel College, Oxford, 25-27 July*
- Lam Ting Kwai, 2004, *Confucianism and Democracy in the Civic Education Guidelines in Hong Kong*, Thesis, Master of Education, The University of Hong Kong
- Shui Che Fok, 1997, "Political Change in Hong Kong and Its Implications for Civic Education," *Journal of Moral Education*, Vol. 26, No. 1, pp. 85-99
- Tammy Kwan, 2003, "Geography and Citizenship Education in Hong Kong," *International Research in Geographical and Environmental Education*, Vol. 12, No. 1, pp. 64-71
- Thomas Kwan-Choi Tse, 2000, "Deformed Citizenship: a critique of the junior secondary Economic and Public Affairs syllabus and textbooks in Hong Kong," *Pedagogy, Culture and Society*, Volume 8, Number 1, pp. 93-110